

POLITIK DINASTI DAN PELEMBAGAAN PARTAI POLITIK

Pengalaman DPC PDIP dan Keluarga Banteng di Kepulauan Selayar

Abu Bakar

Mahasiswa Pascasarjana Ilmu Politik-Pemerintahan UGM

Abstrak

Tulisan ini menjelaskan bagaimana pelebagaan partai politik di tingkat local dan masalah politik kekerabatan yang terjadi didalam partai politik. Kemudian akan memaparkan bagaimana rekrutmen kandidat berjalan secara eksklusif dengan meninjau pengalaman DPC PDIP Kab. Kepulauan Selayar. Sebelum menjelaskan lebih jauh mengenai pelebagaan dan rekrutmen politik dalam partai politik, maka sebaiknya dikemukakan beberapa fakta adanya politik kekerabatan yang terjadi. Baik hal kekuasaan didalam internal partai politik maupun eksternal. Misalnya, bagaimana jejaring kelompok kekuasaan terbentuk di pemerintahan yang lebih pada basis kekerabatan.

Kata Kunci:

Politik Dinasti

I. Pendahuluan

Sepertinya, politik kekerabatan bukan menjadi hal baru dan hanya terjadi di Indonesia, tapi hampir semua Negara di dunia mengalami hal yang sama. Tidak hanya negara yang mengalami transisi pemerintahan dari otoriter menuju demokrasi, negara mapan sekalipun yang telah lama menjalankan demokrasi juga tidak lepas dari hal yang sama

Amerika Serikat, keluarga Kennedy masih dianggap sebagai kekuatan politik berpengaruh atau dihormati, baik di Massachussets maupun di tingkat negara federal. Demikian pula dengan keluarga Bill Clinton yang merupakan mantan orang nomor satu di negeri Paman Sam tersebut, dimana istrinya juga menjabat sebagai menteri luar negeri Amerika Serikat. Meski keluarga-keluarga ini masih memiliki

pengaruh, prestise, atau kekuatan finansial, prinsip *equality of opportunity* benar-benar dihormati dan dijalankan sehingga kemunculan tokoh-tokoh dari keluarga politik ini tidak menimbulkan resistensi yang meluas dikalangan pemilih yang rasional. Selain itu, dengan *free and fair competition*, kompetisi jabatan publik sulit untuk dimanipulasi dengan politik pencitraan atau mobilisasi pemilih melalui aparat pemerintah (Harjanto, 2011). Nah, inilah bedanya di negeri ini, dalam membangun politik dinasti atau kekerabatan tersebut kecenderungan yang digunakan adalah penggunaan sumberdaya kekuasaan baik formal maupun informal. Dan tidak jarang permainan kotor dipraktekkan dengan cara menekan apparatus yang bekerja dalam institusi partai politik atau institusi pemerintahan.

Hal ini terjadi dikarenakan buruknya proses rekrutmen dalam sebuah partai politik, yang berakibat fatal setelah menjadi pemenang dalam pemilu dan pemilukada. Contoh yang sering jadi objek sorotan dalam studi-studi politik dinasti atau *local strongmen* di Indonesia, bagaimana pemenang dalam pemilukada atau pemilu justru bermetamorfosis yang dari dulunya berprofesi sebagai pengusaha atau lainnya, tiba-tiba menjadi penguasa ditingkat local. Parahnya, posisi yang mereka dapatkan justru dijadikan sebagai instrument dalam merekrut anggota keluarganya menjadi penguasa-penguasa satelit. Misalnya saja Ratu Atut Choysiyah di Banten, bagaimana dia menggunakan institusi partai dan pemerintrahan dalam menjalankan kuasanya, menciptakan apa yang saya sebut sebagai penguasa-penguasa satelit. Adiknya didorong menjadi wakil bupati Serang dan adik iparnya didorong menjadi wali kota Tangerang dan semuanya dibawah naungan administratif provinsi Banten yang dipimpin gubernur Ratu Atut Choysiyah sendiri. Ini tidak hanya terjadi di Banten, keluarga Yasin Limpo di Sulawesi Selatan, Sjachroedin ZP di Lampung, Sarundajang di Sulawesi Utara serta banyak didaerah lainnya (Kompas, 7/3/13).

Kasus yang sama terjadi di kabupaten Kepulauan Selayar Sulawesi Selatan, yang menjadi focus studi dalam tulisan ini. Jika kita mencermati hasil pemilu legislatif tahun 2009 yang lalu, dimana yang duduk dalam fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) semuanya ditempati oleh satu keluarga yang selanjutnya saya sebut sebagai *Keluarga Banteng*. Pada pemilu 2009, PDIP memperoleh enam kursi di DPRD Kep. Selayar dari lima dapil, dimana nama-namanya adalah Muh. Anas Kasman Ali yang memegang posisi wakil ketua DPRD, M. Basli Ali (anggota fraksi/komisi C), Hj. Asnaina Chaeruddin (sekretaris Fraksi/Komisi A), Hj. Asmawar Samsu (wakil ketua fraksi/ komisi B), Hj. Hafsa Kasman Ali (anggota fraksi/komisi B) (Contrend Media Selayar, 2013). Untungnya, kandidat dari *Keluarga Banteng* tidak menjadi pemenang dalam pemilukada 2010. Seandainya menjadi pemenang maka akan sulit melakukan proses *checks and balances* yang efektif karena simpul kekuasaan eksekutif dan legislatif di satu keluarga. Ini menunjukkan bahwa ada yang bermasalah dalam hal rekrutmen legislatif yang dilakukan oleh pengurus DPC PDIP, dimana ruang bagi orang-orang diluar dari kerabatnya sangat sulit masuk dalam daftar kandidat. Sekalipun ada, hanya sebatas sebagai penambah suara belaka dan sekedar memenuhi syarat yang ditetapkan oleh KPU. Ini dikarenakan yang mereka tempatkan sebagai calon legislatif atau kandidat, secara popularitas dan sumberdaya sangat lemah di kalangan electoral.

Jika politik kekerabatan yang mana kekuasaan terpusat pada satu keluarga

semakin meluas, maka dikhawatirkan Indonesia akan mengikuti pengalaman negara-negara tetangga lainnya dan semakin mengokohkannya. Seperti Filipina dan Thailand yang tumbuh pesat apa yang dikenal dengan *bosisme*, dimana hampir semua territorial dikuasainya dengan membentuk struktur jaringan dan pada akhirnya negara hanya dijalankan oleh sekelompok elit atau orang-orang kuat local tersebut. Apalagi fenomena ini telah nampak dari kajian yang dilakukan oleh John T. Sidel (2005), bahwa sebenarnya kecenderungan rotasi pejabat pemerintahan dimasa Soeharto dengan sendirinya memberikan ruang bagi pejabat-pejabat tersebut untuk membangun basis ditingkat local dengan menggunakan kekuasaan yang dimilikinya, dan pengaruh yang diciptakan telah bertahan sampai sekarang.

Pengaruh ini juga telah menjadi modal social bagi keluarga tertentu yang terjun ke arena politik praktis. Ini bertahan sampai masuk tahapan demokratisasi di Indonesia. Demokrasi yang dibayangkan sebagai kerangka praktis dimana semua unsur masyarakat terlibat secara setara dalam arena politik dan mengakses kekuasaan secara bebas melalui tahapan yang ada, justru dikuasi dan ditentukan oleh segelintir orang atau elit saja. Dan parahnya, jika kemudian yang mengontrol ataupun yang menjalankan struktur kekuasaan berada dalam satu kelompok keluarga atau kerabat tertentu.

Partai politik sebagai prasyarat institusi demokrasi, diciptakan sebagai alat perjuangan nilai dan ideology tertentu melalui struktur kekuasaan dan kekuasaan itu diperoleh melalui keikutsertaannya dalam pemilihan umum (Pamungkas, 2011). Tentu keikutsertaan dalam pemilu dilatari atas nilai dan bagaimana aspirasi dan hak-hak warganegara dapat diperjuangkan lewat partai politik tersebut. Namun menjadi soal, ketika partai politik dalam hal rekrutmen anggota atau kandidat tidak melibatkan kelompok yang direpresentasikan. Sehingga kecenderungan yang muncul adalah monopoli dalam partai karena sudah diasumsikan bahwa partai politik adalah milik keluarga dengan alasan (misalnya) bahwa keluarga mereka yang pertama kali mendirikan partai tersebut, maka imbalannya adalah kelompok merekalah yang menjadi dominan dalam struktur pengambil kebijakan dalam partai paling tidak kepentingan mereka harus diutamakan. Jika demikian terjadi maka dapat dipastikan bahwa partai politik dalam hal rekrutmen kandidat akan mengalami kecenderungan eksklusif dan otoriter. Bukan hanya memikirkan kemenangan, akan tetapi memikirkan kelanjutan kekuasaan. Hingga pilihan rasionalnya adalah memastikan pemegang kekuasaan berada ditangan anggotanya (Michels, 1984). Mungkin dari sinilah Geoff Mulgan (1995) menyandarkan pandangannya, bahwa dalam tatanan demokrasi bagaimanapun akan muncul oligarki yang mengatasnamakan masyarakat banyak, hingga nilai-nilai demokrasi akan terbantahkan dengan sendirinya. Keputusan yang dihasilkan partai politik tidak lagi menyandarkan pada aspirasi masyarakat, paling tidak anggotanya secara keseluruhan, melainkan keputusan segelintir orang.

Jika demikian yang terjadi, maka fungsi utama partai politik menjadi kabur. Dimana partai politik berfungsi untuk menyerap dan menyalurkan aspirasi dan kepentingan rakyat; melakukan pendidikan politik kepada masyarakat tentang hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan bernegara; melakukan rekrutmen politik secara demokratis sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku untuk

mengisi jabatan-jabatan publik di semua tingkatan pemerintahan; memformulasi dan menetapkan kebijakan umum melalui institusi legislatif dan eksekutif di semua tingkatan pemerintahan; melakukan pengawasan atas pelaksanaan kebijakan publik melalui para kadernya di lembaga legislatif; menjadi penengah antara kepentingan/aspirasi rakyat dengan pemerintah beserta kebijakan-kebijakannya; dan tentunya menjadi alat pengontrol kepentingan pribadi politisi yang duduk sebagai wakil rakyat maupun pejabat politik (Harjanto, 2011).

Monopoli atau menjadi mayoritas dalam struktur partai semakin menguatkan politik kekerabatan, dimana kekuasaan partai terpusat pada keluarga tertentu dan membuat nilai demokrasi dalam partai politik tersebut semakin terdistorsi. Dan ini tidak hanya terjadi dalam partai politik yang dikelola dengan model sentralistik, akan tetapi dapat terjadi pula dalam model desentralistik. Sekalipun kewenangan dalam hal rekrutmen kandidat tidak dimonopoli oleh DPP, tetap memiliki peluang diranah local atau DPC sebagaimana terjadi di DPC PDIP Kab. Kepulauan Selayar yang hampir semua menduduki posisi kunci dalam struktur partai.

Olehnya itu, tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan, bagaimana upaya pelembagaan partai politik di tingkat local dengan mengacu pada cara rekrutmen kandidat? Bagaimana politik kekerabatan bermain dalam partai politik di tingkat local serta seberapa efektifkah model desentralisasi partai politik dengan mangacu pada pengalaman DPC PDIP di Kab. Kepulauan Selayar?

II. Pembahasan

Pelembagaan Partai Politik: Sebuah tinjauan.

Seperti yang disinggung sebelumnya bahwa kehadiran partai politik adalah keniscayaan dalam sebuah Negara yang demokratis. Ini dikarenakan partai politik sebagai institusi dibayangkan sebagai saluran bagi negosiasi kekuasaan antara masyarakat dan Negara dengan menggunakan pemilihan umum sebagai alat untuk menduduki posisi kunci yang pada akhirnya menjadi tempat bagi negosiasi tersebut. Berbeda dengan kelompok kepentingan (*inters group*) dan kelompok penekan (*pressure group*) lainnya, sekalipun sama-sama dapat bertindak untuk menyalurkan aspirasi masyarakat, akan tetapi kedua kelompok ini tidak dapat terjun untuk berkompetisi dalam pemilu. Menjadi kata kunci bagi perbedaan antara partai politik dan kelompok kepentingan lainnya adalah bagaimana cara mereka memperlakukan kekuasaan. Ini dapat dilihat dengan cara bahwa partai politik dapat mempengaruhi jalannya pemerintahan dengan mengajukan calon-calon (kandidat) mereka untuk menempati jabatan public. Sementara kelompok kepentingan lainnya hanya dapat mempengaruhi dan melakukan propaganda dalam hal usahanya mempengaruhi kebijakan suatu pemerintahan (Pamungkas, 2011; 6-7).

Dikarenakan peran partai politik yang sangat vital dalam sebuah Negara modern, maka sangat berbahaya jika kemudian partai dihilangkan karena akan menjurus pada apa yang sering disebut otoriter. Namun menjadi kendala tersendiri, ketika partai yang diharapkan sebagai lembaga yang menjalankan prinsip demokratis dalam rangka memastikan bahwa semua proses pengambilan kebijakan partai berdasarkan suara mayoritas justru dibajak oleh sekelompok orang tertentu. Dari pola seperti ini juga yang menciptakan politik kekerabatan dalam sebuah partai

politik. Dimana dominannya tokoh tertentu atau kelompok tertentu menjadikan partai rapuh dan tidak berjalan sebagai kesatuan sebuah institusi. Atau boleh dikatakan partai politik berjalan atas kehendak sekelompok elit atau kerabat, yang mendorong mekanisme partai menjadi otoriter.

Atas hal demikian, beberapa pandangan akan kehadiran partai politik menjadi masalah serius (oposisi/menolak kehadiran partai politik) dan ini bermula dari sejarah kelahiran partai politik itu sendiri. Huntington (2003; 478-479) menjelaskan oposisi ini menjadi tiga golongan; *pertama*, kaum konservatif. Kelompok ini menolak kehadiran partai politik dikarenakan partai politik dianggap sebagai ancaman terhadap struktur social yang telah mapan. Dimana masyarakat tradisional biasanya masih kuat pengaruh elit yang bersandarkan pada warisan, status social dan kepemilikan lahan. Sementara partai hadir, bukan hanya mendobrak tradisi melainkan melahirkan gagasan modernism yang melawan arus tradisional.

Kedua, kelompok administrator. Kelompok ini menolak kehadiran partai politik dikarenakan kehadiran partai menyebabkan perluasan wawasan partisipasi politik bagi masyarakat untuk terlibat dalam arena politik. Sementara kelompok administrator ini menghendaki agar pemerintahan berjalan secara efisien tanpa ada konflik. Nah, keterlibatan masyarakat secara luas akan membuka peluang konflik yang lebih besar. Namun, pada dasarnya kelompok ini menerima gagasan rasionalisasi struktur social dan ekonomi yang dibawa oleh partai politik, kecuali yang satu itu, keterlibatan secara luas partisipasi masyarakat.

Ketiga, kelompok populis. Kelompok ini menolak partisipasi politik diorganisir dalam sebuah struktur. Kelompok ini merupakan penganut paham Rousseau yang menekankan pada demokrasi langsung tanpa melalui partai politik. Argumentasi yang mereka bangun adalah bahwa struktur sosial yang telah ada, mampu menjembatani antara penguasa dan masyarakat. Akan tetapi kelompok ini tetap menerima gagasan partisipasi politik yang biasanya didengungkan oleh partai politik.

Beberapa pernyataan akhir-akhir ini mengenai buruknya perilaku elit dalam partai politik menjadi berdasar ketika kemudian banyak menganggap partai politik sekedar mencari kekuasaan dan kekayaan. Ini bisa jadi akan bermuarah pada "kemiripan" argumentasi ketiga golongan yang diutarakan oleh Huntington tersebut. Sehingga akan muncul kelompok yang menolak kehadiran partai politik karena dianggap tidak memberikan perubahan. Masyarakat mulai merasa bahwa yang duduk dalam kekuasaan bukanlah representasi dari mereka. Jadi kecenderungan yang terjadi adalah model delegasi, dimana pasca pemilu menjadi awal dan akhir hubungan antara kandidat dengan pemilih. Dengan posisi itu, semakin menyulitkan perubahan yang sebagaimana dikehendaki oleh masyarakat.

Hal ini terjadi dikarenakan partai politik tidak menjalankan fungsi-fungsi mereka dengan baik. Ini juga dapat berpengaruh terhadap upaya pelembagaan partai politik, dimana semakin jauh dari fungsi dasarnya maka semakin sulit terlembagakan. Secara kelembagaan, partai politik memiliki jenis yang sangat beragam, yang masing-masing memiliki kekurangan dan kelebihan dalam pelaksanaan mekanisme pengorganisasiannya (Harjanto, 2011). Oleh karenanya, beragamnya jenis partai politik dengan sendirinya berimplikasi pada perbedaan

ideology. Perbedaan ini pula akan melahirkan corak pengorganisasian yang berbeda antara partai yang satu dengan yang lainnya, hingga menyulitkan standarisasi partai politik yang bagaimana yang lebih baik. Termasuk perbedaan konteks akan ikut menentukan jenis partai mana yang lebih baik, partai yang baik di Indonesia bukan berarti akan sama baiknya dengan partai – partai yang ada di Eropa atau di Amerika. Kemenangan partai politik di wilayah electoral, juga bukan menjadi tolak ukur sejauhmana keberhasilan pelebagaan partai politik tersebut. Menurut Harjanto (2011), parpol bisa sukses dalam pemilu semata-mata karena faktor *electoral fortunes* atau faktor *exogenous* lainnya. Termasuk factor lain yang menyertainya, sebagaimana tulisan Michael Buehler (dalam Erb & Sulistiyanto, 2009) yang melihat bahwa kemenangan dalam sebuah pemilihan, factor ketokohan juga ikut menentukan. Termasuk partisipasi politik dan preferensi pemilih dapat dikontrol oleh faktor kedekatan dengan figure / tokoh partai tertentu dan kondisi ekonomi politik dapat mempengaruhi agregat pencapaian dalam pemilihan (lihat Mujani, Liddle & Ambardi, 2012).

Jika kita melihat klasifikasi Gunther dan Diamond sebagaimana dikutip oleh Pamungkas dan Harjanto, menunjukkan bahwa betapa beragamnya jenis partai yang ada dan dengan sendirinya memiliki kekhasan tersendiri dalam pengorganisasiannya. Gunther dan Diamond mengidentifikasi *genus* tipe partai politik yang kemudian melahirkan 15 spesies. Dimana *genus* pertama adalah partai politik yang berbasis elite, dimana ada parpol tradisional-lokal yang dipimpin keluarga bangsawan/terhormat serta partai politik yang klientelistik. *Genus* kedua adalah partai politik yang berbasis etnisitas, dengan dua tipe utamanya, yaitu partai politik *congress* dan partai politik etnis. *Genus* ketiga adalah partai politik berbasis *movement* seperti partai politik Libertarian Kiri atau partai politik ekstrem kanan Pasca-industrial. *Genus* keempat adalah partai politik berbasis elektoralis, dengan jenisnya seperti partai politik yang personalistik, partai politik yang *catch-all*, dan partai politik yang programatik. Sedangkan *genus* terakhir adalah partai politik yang berbasis massa, dimana di sini ada tiga kategori besar, yaitu partai politik massa berbasis agama (partai politik fundamentalis atau partai politik denominational), partai politik massa berbasis nasionalisme (partai politik pluralis-nasionalis dan partai politik ultranasionalis), serta partai politik massa berbasis sosialisme (partai politik Leninis dan partai politik Massa-kelas). Klasifikasi ini didasarkan pada tiga hal; (1) bentuk atau sifat dasar organisasi partai politik (tebal/tipis, berbasis massa/ elit dan sebagainya), (2) orientasi programatik partai politik, dan (3) strategi dan norma perilaku partai politik.

Dengan demikian, berbicara mengenai pelebagaan partai politik menjadi sulit untuk menentukan partai yang bagaimana yang telah terlebagaakan. Secara umum, pelebagaan partai politik dalam pengertian klasik Huntington adalah ketika organisasi partai politik telah mendapatkan *value and stability*. Jika partai politik telah berhasil memformulasi dan menginternalisasi nilai-nilai organisasionalnya serta dalam periode waktu tertentu terdapat stabilitas internal, maka partai dapat dikatakan terlebagaakan dengan baik (Harjanto, 2011).

Untuk memahami pelebagaan partai politik, Huntington (2003) mengajukan beberapa kriteria yang dapat dijadikan tolak ukur sejauhmana partai politik atau

organisasi terlembagakan, diantaranya penyesuaian diri, kompleksitas, otonomi dan keterpaduannya. *Pertama*, penyesuaian diri dan kekuasaan. Dikatakan bahwa semakin mudah suatu partai menyesuaikan diri, maka semakin tinggi derajat pelembagaannya. Sebaliknya, semakin sulit melakukan penyesuaian diri dan tingginya kekakuan suatu partai, maka semakin rendah derajat pembagaannya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri partai politik dapat diukur dari *segi umur*, dimana semakin tua eksistensi suatu partai maka akan semakin terlembaga.

Kedua, kompleksitas dan kesederhanaan. Semakin kompleks suatu organisasi, akan semakin tinggi derajat pelembagaannya. Kompleksitas dapat menambah jumlah sub-unit organisasi, baik dari segi hierarki maupun fungsional, dan diferensiasi berbagai tipe sub-unit organisasi yang terpisah. *Ketiga*, otonomi - subordinasi. Pada konteks ini, pelembagaan dapat terjadi sejauhmana organisasi atau partai politik dan prosedur tidak tergantung dari kelompok social dan metode perilaku lain. Perilaku organisasi yang otonom memiliki kemandirian dan terbebas dari pengaruh-pengaruh kelompok social.

Sementara itu, hampir sama apa yang diajukan oleh Yves Meny dan Andrew Knapp (dalam Pamungkas, 2011) yang menyebutkan kriteria yang dapat dijadikan sebagai tolak ukur sejauh mana suatu organisasi atau partai politik terlembagakan. Menurutnya, *pertama*; usia organisasi. Dimana setiap organisasi yang berkembang secara normal dan alamiah sesuai tahapan waktunya akan melahirkan konsistensi pada perilaku yang sesuai ide-ide dan nilai-nilai yang berkembang didalamnya. Jadi semakin tua organisasi tersebut, amak semakin terlembagakan.

Kedua, depersonalisasi organisasi. Kriteria ini menjelaskan bahwa anggota organisasi (baik dalam struktur atau diluar struktur) menyadari dan menempatkan organisasi sebagai institusi yang netral dari kepentingan personal lantaran memegang posisi penting dalam organisasi. Jadi semakin sulit dalam melakukan suksesi kepemimpinan dalam suatu partai akibat adanya kekuatan personal yang dominan, maka dapat dikategorikan bahwa partai atau organisasi tersebut belum terlembagakan. Dan sepertinya kriteria ini menjangkiti beberapa partai di Indonesia, baik level nasional, regional maupun local.

Ketiga, diferensiasi organisasional. Dimana kriteria ini menekankan sejauhmana organisasi atau partai berhasil mengorganisir diri sebagai instrument untuk memobilisasi dukungan konstituennya. Semakin besar dukungan yang dapat dimobilisasikan dan disalurkan aspirasinya melalui suatu partai, maka semakin besar pula potensi pelembagaannya.

Sementara itu, Randall dan Svasand (2002, lihat juga Harjanto, 2011; Pamungkas, 2011) menyebutkan bahwa pelembagaan partai politik melibatkan setidaknya empat variabel penting, yaitu; *systemness*, *decisional autonomy*, *value infusion*, dan *reification*. *Systemness* merujuk pada pengelolaan infrastruktur partai dan dinamika internalnya, yaitu proses pelaksanaa fungsi-fungsi partai dan ketentuan lainnya yang telah disepakati oleh partai; *decisional autonomy* terkait dengan hubungan partai politik dan lingkungan eksternalnya, khususnya menyangkut otonomi politik dan finansial, keterkaitannya dengan organisasi massa, dan kemampuan partai untuk otonom dari permainan politik di tingkat nasional dan lokal; *value infusion*, mirip dengan pemahaman di atas, dimana nilai-nilai ideologis

yang dapat menarik dan melekat pada para anggota atau pendukung menjadi perhatian utama dan terakhir; *reification* terkait dengan kemampuan partai politik untuk menanamkan suatu citra atau *brand name* tertentu di benak para pemilih.

Dari beberapa kriteria diatas, setidaknya dapat disimpulkan garis besarnya bahwa ada beberapa syarat penting dalam pelebagaan sebuah partai politik dimana antara lain; pengakaran partai pada masyarakat dengan stabil; partai yang otonom tanpa terpengaru oleh kekuatan individu baik dalam maupun luar, dimana partai diperlakukan sebagai institusi yang segala tindak tanduknya terbebas dari bayang-bayang kepentingan kelompok tertentu; apparatus partai konsisten terhadap tujuan partai dan ketentuan-ketentuan yang ditetapkan partai; dan pengelolaan faksionalisasi yang sehat dalam partai dan ditambah kemampuan mobilisasi dukungan.

Rekrutmen dalam Partai Politik

Dari uraian sebelumnya, terkait dengan pelebagaan partai politik. Selanjutnya tulisan ini akan lebih memfokuskan pada bagaimana mekanisme rekrutmen dalam sebuah partai politik. Jika sebelumnya telah disinggung bahwa sebuah partai politik yang terlembaga mesti memenuhi kriteria dimana partai bertindak sebagai institusi bukan atas dasar kemauan personal dikarenakan memegang posisi penting.

Beberapa literature menjelaskan bahwa rekrutmen politik dapat didefinisikan sebagai suatu proses dimana individu atau kelompok-kelompok dilibatkan dalam peran-peran politik secara aktif. Ditekankan bahwa pelibatan yang dimaksudkan sebagai upaya menarik kandidat yang potensial untuk bersaing dalam merebut jabatan public(Pamungkas,2011).

Membicarakan rekrutmen politik, maka ada empat hal yang perlu diperhatikan, diantaranya; siapa kandidat yang dapat dinominasikan (candidacy); Siapa yang menyeleksi (selectorate); Dimana kandidat di seleksi; dan terakhir bagaimana kandidat diputuskan. Empat hal ini menentukan model pengelolaan partai politik, apakah inklusif atau eksklusif, sentralistik atau desentralistik dan demokratis atau otoriter (Pamungkas, 2011).

Dalam model inklusif, setiap pemilih dapat menjadi kandidat partai, kecuali dibatasi oleh regulasi negara. Sementara model eksklusif, terdapat sejumlah kondisi yang membatasi hak pemilih untuk dapat ikut serta dalam seleksi kandidat. Ini dikarenakan partai politik memberikan syarat-syarat tertentu. Dalam titik ekstrim, kandidat ditentukan oleh ketua partai. Hal yang sama dapat diberlakukan dalam model sentralisasi dan desentralisasi, bahwa yang bertindak sebagai *the selectorate* apakah dipusat atau di daerah. Dan apakah bersifat demokratis atau bersifat otoriter.

Dalam hal rekrutmen politik, partai politik bertindak sebagai regulator yang menentukan layak tidaknya dalam kandidasi dan siapa saja yang layak untuk di nominasikan. Jika suatu partai bertindak dengan melibatkan para kadernya dalam hal penentuan maka semakin demokratis suatu partai tersebut. Begitupun sebaliknya, jika yang menentukan hanya sedikit maka nilai agregat demokratisnya semakin rendah. Hal ini juga mengacu pada pelebagaan partai politik Biasanya dalam hal kandidasi atau penominasian partai politik jauh dari *decisional autonomy*

dimana ditemukan justru sangat kental aroma ketergantungan pada pihak-pihak tertentu, bahkan jauh dari itu, ada semacam ketergantungan pada finansial seseorang. Hingga yang terjadi bukan berdasarkan *sertifikasi* atau syarat yang telah digariskan oleh partai melainkan orang yang bermodal yang menentukan arah jalannya penominasian dalam partai tersebut. Soal lain yang menjadi kendala tersendiri adalah sentralnya peran tokoh tertentu dalam partai politik, bahkan pengurus pusat mampu menentukan jalannya kepartaian di tingkat local. Kandidasi yang berlangsung ditingkat local misalnya, justru dikontrol secara kuat oleh pengurus atau tokoh sentral ditingkat pusat (Lihat Immawan dan Sukmajati, 2003)

Disnilah menjadi masalah tersendiri, yang biasanya berujung pada konflik internal. Karena adanya kehendak yang berbeda dari suara kader yang mayoritas dengan kelompok penentu disisi lain. Menurut Pratikno (2007), konflik yang terjadi dalam hal rekrutmen politik ini mengindikasikan beberapa hal. *Pertama*, hal tersebut menandakan bahwa demokrasi internal partai politik tidak terjadi dan struktur organisasi partai di Indonesia kebanyakan masih tersentralisasi. Ini bisa dilihat (misalnya dalam pemilukada), dimana yang memahami kondisi daerah adalah pengurus tingkat local, namun yang memutuskan adalah tingkat pusat. Akibatnya, konflik terbuka antar tingkat organisasi partai tidak bisa dihindari. *Kedua*, munculnya konflik ini juga menunjukkan marginalisasi massa dan kader di daerah dalam proses pembuatan keputusan partai. Pola kepemimpinan partai yang bersifat oligarkis mengakibatkan terbatasnya ruang partisipasi massa dalam proses pembuatan keputusan partai. Hal ini menyebabkan tahirnya konflik antar organisasi partai dengan kader pada level akar rumput sangat sering terjadi. Ini bisa dipahami mengingat massa akar rumput merasa tidak puas terhadap proses pencalonan dan dengan kandidat yang diatur dari organisasi partai. Senada disampaikan oleh Imawan (2011), bahwa salah satu sebab kondisi demikian terjadi dikarenakan partai politik di Indonesia masih bersifat *sentrifugal*. Ini jauh dari prinsip dasar dari demokrasi, dimana partai dibangun atas dasar atau prinsip kekuasaan yang memencar (*sentripetal*).

Misalnya saja, proses pencalonan keluarga Kasman Ali sebagai kandidat calon bupati di kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2010. Sekalipun Samsu Alam Ibrahim bukan sebagai kader PDIP, akan tetapi punya kedekatan dengan ketua DPC yakni Kasman Ali. Samsu Alam sendiri merupakan ipar dari Kasman Ali, yakni suami dari Hj. Asmawar yang merupakan saudara kandung Kasman Ali.

Pencalonan ini tidak mengikuti konvensi, namun atas rekomendasi dari *keluarga banteng* ini maka DPP PDIP menetapkan Samsu Alam sebagai kandidat yang diusung oleh PDIP dalam pemilukada di Kepulauan Selayar. Karena keputusan yang sentralistik, maka sebagaimana disampaikan Pratikno (2007) ada semacam marginalisasi peran massa dan kader. Implikasi dari kandidasi tersebut, PDIP harus kehilangan 37,5 persen suara dari konstituen PDIP sebagaimana yang dirilis oleh Jaringan Suara Indonesia (Contrend Media Selayar, 16/5/2010), dimana 37,5 persen itu lebih memilih *incumbent*. Sekalipun suara yang lari ini tidak ditentukan secara absolut karena tidak adanya pelibatan massa dalam kandidasi, melainkan adanya juga factor keberhasilan ekonomi-politik dari incumbent Syahrir Wahab. Namun, dari hal ini juga menunjukkan bahwa PDIP tidak berhasil membangun massa yang

berbasis ideologis.

Setidaknya jika mengikuti kehendak kader atau massa PDIP di Kepulauan Selayar, paling tidak melibatkan kader dalam penentuan kandidasi, maka akan berpengaruh terhadap preferensi pemilih dalam pemilukada. Hingga 37,5 persen tersebut tidak lari begitu saja, yang awalnya memilih kandidat legislatif dari PDIP namun memilih yang lain di kandidat eksekutif.

Politik Kekerabatan; Keluarga Banteng

Politik kekerabatan atau lebih dikenal politik dinasti, bukan barang baru dalam kajian politik Indonesia. Hampir disemua daerah, kecenderungan untuk mempertahankan anggota keluarga atau kerabat dalam jaringan kekuasaan adalah hal biasa dalam rangka memastikan kekuasaan tetap dalam gerbong keluarga. Hal ini dapat dilihat dari beberapa literature yang menjelaskan tentang politik kekerabatan, misalnya saja; studi yang dilakukan oleh Kiki Luthfillah (dalam Haryanto, 2013) di provinsi Banten. Dalam studinya tentang Demokrasi dan Kekuasaan dalam Politik Lokal: Dominasi Kekuasaan Keluarga TB. Chasan Sochib di Provinsi Banten pasca Reformasi, Luthfillah menjelaskan bagaimana dominasi kekuasaan yang dilakukan oleh Chasan Sochib dengan menempatkan jaringan keluarganya pada jabatan politik dan pemerintahan. Bermula dari naiknya Ratu Atut sebagai wakil gubernur di provinsi Banten yang kemudian menciptakan apa yang saya sebut sebelumnya sebagai penciptaan penguasa-penguasa satelit. Studi yang sama dilakukan oleh Syarif Hidayat (2007), dengan menekankan pada pendekatan ekonomi politik keluarga Chasan Sochib yang telah berhasil menguasai posisi kunci pengambilan kebijakan hingga yang muncul adalah apa yang disebutnya sebagai *shadow state*.

Studi yang sama dilakukan oleh Andi Faisal Bakti (2007), tentang kekuasaan keluarga Puang di kabupaten Wajo. Dari pengalaman dan karirnya Puang selama Orde Baru, telah mampu membangun atau menciptakan modal social yang kemudian dimaksimalkan ketika desentralisasi dilaksanakan. Dengan pemilihan kepala daerah langsung, telah memberikan ruang bagi keluarga Puang untuk memainkan modal social yang dimilikinya. Namun, menjadi bermasalah ketika kemudian kekuasaan yang didapatkan digunakan untuk membangun apa yang dinamakan politik dinasti.

Dari paparan studi sebelumnya, maka yang dapat diselidiki bahwa sesungguhnya desentralisasi dan demokratisasi yang diharapkan memberikan ruang kesetaraan dalam panggung politik justru menjadi instrument dalam pelanggaran kekuasaan keluarga atau kerabat.

Tidak hanya berhenti dalam pemerintahan, dalam partai politik juga terjadi demikian. Ini dikarenakan bahwa partai politik adalah satu-satunya organisasi yang dapat terjun di arena kontestasi untuk memperebutkan jabatan-jabatan public. Hingga untuk memastikan agar kekuasaan public yang diperebutkan dapat dicapai dengan mudah, maka harus dipastikan pula bahwa posisi-posisi strategis dalam partai harus dikuasai.

Disinilah runyamnya pelembagaan partai politik, ketika partai politik tidak lagi bertindak sebagai institusi melainkan bertindak sebagai individu atau kerabat tertentu. Ini menjadi penting untuk dicermati, bahwa sekarang ini ada kecenderungan bagi partai-partai di tingkat local menggunakan partai untuk melanggengkan dominasi keluarga. Penguasaan terhadap partai politik ditingkat local akan berimplikasi terhadap rekrutmen politik dalam rangka kandidasi.

Apa yang menjadi syarat atau kriteria yang digunakan oleh Meny dan Knapp (Pamungkas, 2011) tentang depersonalisasi organisasi menjadi tolak ukur sejauhmana pelembagaan partai politik. Dimana semakin jauh partai politik dari pengaruh atau control individu tertentu, maka semakin tinggi derajat pelembagaannya. Lalu bagaimana dengan mekanisme rekrutmen partai politik di tingkat local?. Indikasi yang ditemukan, bahwa ada kecenderungan partai tidak bekerja sebagaimana fungsinya baik dalam hal operasinalnya maupun metode rekrutmennya. Ini dikarenakan partai politik bukan lagi bertindak atas nama partai atau sebagai institusi melainkan atas nama siapa yang menguasai partai. Hingga yang terjadi adalah siapa yang menjadi ketua, maka itu juga yang menentukan dalam hal kandidasi. Ini juga terlihat ketika pengaruh personal atau kuatnya kekerabatan akan memepengaruhi suksesi kepemimpinan di dalam partai. Biasanya, partai yang kuat pengaruh personalnya akan sulit melakukan suksesi, walaupun agar kelihatan demokratis maka yang diajukan dalam suksesi adalah atas perintah sang ketua (orang kuat partai). Jadi semakin sulit dalam melakukan suksesi kepemimpinan dalam suatu partai akibat adanya kekuatan personal yang dominan, maka dapat dikategorikan bahwa partai atau organisasi tersebut belum terlembagakan.

Mengenai monopoli ini, jauh sebelumnya, Lipset (2007) telah mengingatkan dengan mengatakan bahwa proses suksesi kepemimpinan yang dimonopoli (kepemimpinan otiriter) akan berakibat vatal ketika pemimpin tersebut meninggal dunia, dimana orang-orang didalam suatu organisasi akan bersaing dalam hal pengklaiman siapa yang berhak diantara mereka untuk melanjutkan kepemimpinan. Jika ini terjadi, maka akan muncul faksionalisasi dalam tubuh organisasi atau partai politik tersebut.

Pengaruh personalisasi dalam partai politik diakibatkan oleh kuatnya ambisi seseorang untuk menggunakan partai politik dalam rangka memastikan jabatan public yang diperebutkan tidak lepas dari dirinya tau paling tidak dari kerabatnya. Ini terjadi pada Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kabupaten Kepulauan Selayar. Dimana dominannya pengaruh Kasman Ali dalam hal pengambilan kebijakan partai ditingkat local, berakibat pada kemanunggalan institusi dan personal. Menyebut PDIP di kabupaten Kepulauan Selayar, maka yang terbayang adalah individu Kasman Ali. Dari segi *reification* terkait dengan kemampuan partai politik untuk menanamkan suatu citra atau *brand name* tertentu di benak para pemilih menjadi kabur. Partai sebagai institusi sama sekali tidak tertanam dikepala pemilih, dikarenakan factor personal lebih kuat pengaruhnya.

Kasman Ali dan keluarga biasa disebut sebagai keluarga Berlian memang sangat berpengaruh dikarenakan penguasaannya terhadap sumberdaya ekonomi. Dimana bertindak sebagai kontraktor yang sering memenangkan proyek-proyek

pemerintah di kabupaten Kep.Selayar. Kepemimpinan Kasman Ali di PDIP Kep. Selayar, bisa dibilang cukup sukses menjadikan PDIP sebagai partai yang dapat diperhitungkan. Pada pemilu 2004, PDIP mampu mengantarkan anggotanya menjadi ketua DPRD. Itupun adalah anggota keluarganya. Termasuk yang didorong untuk maju dalam kontestasi di pemilukada 2004 dan 2009, DPC PDIP atas dasar persetujuan DPP PDIP mendorong Samsu Alam Ibrahim sebagai kandidat calon bupati yang juga ipar dari Kasman Ali, yang merupakan suami dari Asmawar (saudara Kasman Ali).

Dan yang menarik adalah hasil pemilu 2009, dimana PDIP berhasil memperoleh kursi di DPRD sebanyak 5 kursi dari 25 kuris yang diperebutkan dengan 6 daerah pemilihan. Dan yang lima kursi tersebut diduduki oleh keluarganya sendiri.

Kelima orang itu adalah Muhammad Anas Kasman Ali, dimana orang ini tidak lain adalah anak kandung dari Kasman Ali. Kemudian Hj. Hafsa Kasman adalah istri dari Kasman Ali, yang merupakan ibu kandung dari Muhammad Anas Kasman Ali. Selanjutnya Hj. Asmawar Samsu dan Hj.Asnaina Chaeruddin yang merupakan saudara dari Kasman Ali. Dan yang terakhir adalah Basli Ali yang merupakan keponakan dari Kasman Ali.

Hingga ruang bagi orang luar atau bukan dari kerabat Kasman Ali menjadi sulit untuk ikut menentukan arah dan bekerjanya partai. Dan keterlibatan para anggota partai lainnya yang bukan dari keluarga Kasman Ali seolah-olah hanya bekerja untuk Kasman Ali dan bukan bekerja atas nama partai sebagai institusi.

Disinilah persoalannya ketika partai tidak lagi bekerja sebagai institusi, akan berimplikasi pada mekanisme rekrutmen. Mekanisme rekrutmen bukan lagi atas nama kepentingan partai melainkan kepentingan keluarga. Jika kita merujuk pada pandangan Czudnowski (dalam Pamungkas, 2011) tentang rekrutmen politik sebagaimana disinggung sebelumnya. Rekrutmen politik dibayangkan sebagai proses dimana individu-individu atau kelompok-kelompok individu dilibatkan dalam peran-peran politik aktif. Dalam hal penentuan (penominasian kandidat), penekanannya adalah pelibatan semua kader atau anggota partai dalam hal kandidasi dengan menggunakan pertimbangan nilai-nilai dan ideology partai serta ketentuan yang diberlakukan oleh negara (regulasi) sebagai tolak ukur dalam proses kandidasi tersebut. Namun menjadi soal ketika menjalankan tahapan rekrutmen politik justru ditentukan oleh kelompok atau individu tertentu.

Penentuan/penominasian sangat penting dalam hal rekrutmen politik. Disinilah akan kelihatan bagaimana suatu partai menjalankan praktik demokratis. Jika hanya Kasman Ali dan keluarganya yang bertindak sebagai *selectorate* ketika menominasikan calon legislatif atau eksekutif di tingkat local, maka tidak dapat dikatakan demokratis.

Dari data KPU Kep. Selayar, daftar nama-nama kandidat atau calon legislative yang dimajukan oleh DPC PDIP untuk pemilu 2014 masih dominan keluarga Kasman Ali. Misalnya saja, di daerah pemilihan satu, masih ada nama Hj. Asnaina Ali Chaeruddin di nomor urut 1 yang merupakan saudara Kasman Ali. Kemudian daerah pemilihan dua, masih ada nama Muhammad Anas Kasman Ali dan Hj. Asmawar Samsu yang masing-masing berada di nomor urut 1 dan 9. Dan di daerah

pemilihan tiga masih ada nama Hj. Hafsah Kasman Ali dan ditambah anaknya Muhammad Aswar Kasman yang masing-masing berada di nomor urut 1 dan 2. Bukan hanya itu, masuknya dua nama yang berada di daerah pemilihan yang sama yakni Hajriani Hamzah dan Firman Hamzah menambah daftar panjang kekerabatan di DPC PDIP. Sekalipun kedua orang terakhir ini belum dikonfirmasi hubungan kekerabatannya dengan Kasman Ali. Nama Basli Ali tidak masuk dalam daftar calon legislatif PDIP dikarenakan pindah partai ke Gerindra.

Dominasi *keluarga banteng* ini juga dapat dilihat dari pencalonan Samsu Alam Ibrahim, yang juga merupakan suami dari saudara Kasman Ali yakni Hj. Asmawar Samsu menjadi calon Bupati dari PDIP di dua pemilukada, pemilukada 2005 dan 2010. Pencalonan ini tidak mengikuti konvensi, namun atas rekomendasi dari *keluarga banteng* ini maka DPP PDIP menetapkan Samsu Alam Ibrahim. Hal ini berakibat pada kehilangan 37,5 persen suara dari konstituen PDIP sebagaimana yang dirilis oleh Jaringan Suara Indonesia (Contrend Media Selayar, 16/5/2010). Ini menunjukkan bahwa ada yang tidak sinkron antara kehendak massa dengan kehendak pengurus PDIP.

Dari pengalaman DPC PDIP Kab. Kepulauan Selayar, menjadi dilematis ketika mendorong agar partai politik dikelola dengan model desentralistik. Sementara, juga menjadi persoalan ketika yang menentukan ditingkat local adalah DPP (sentralistik). Desentralisasi dalam partai politik diasumsikan agar partai bekerja sesuai dengan kondisi yang ada di tingkat local, hingga keputusan partai kontekstual dan kondisional. Namun, akan berbahaya bagi partai politik jika yang mengisi jabatan structural partai adalah berdasarkan kekerabatan. Hingga pelembagaan partai politik akan semakin sulit.

III. Penutup

Sepertinya proses rekrutmen politik di dalam partai politik masih jauh dari yang kita harapkan. Ini terjadi karena partai politik tidak berjalan sebagaimana mestinya yang bekerja sebagai tempat penyemaian bagi calon-calon pemimpin yang mumpuni. Partai politik cenderung bergerak dengan atas nama orang tertentu yang menguasai partai, jadi partai tidak lagi bekerja sebagai institusi.

Disisi lain menjadi dilematis, ketika partai politik yang *sentrifugal* didorong menjadi *sentripetal*, dari sentralisasi menjadi desentralisasi. Walaupun semangat yang melandasinya agar rekrutmen politik ditingkat local dilakukan oleh pengurus local karena yang memahami dinamika dan kondisi di daerah adalah pengurus local itu sendiri. Namun, menjadi absurd ketika mengingat pengalaman PDIP Kep. Selayar. Partai seolah menjadi organisasi keluarga hingga dalam proses kandidasi dipengaruhi factor dominan ketokohan Kasman Ali. Dilain sisi, bagaimanabisa pengurus pusat memutuskan persoalan ditingkat local dengan sekedar membayangkan dan menduga-duga kondisi dialektik di daerah. Inilah persoalan yang perlu dicarikan jalan keluarnya.

Pelembagaan partai politik di Indonesia hanya dapat dicapai jika partai menjalankan fungsinya dan bersifat otonom dalam memperlakukan institusinya sendiri. Dan memberikan akses yang luas bagi kader atau anggota lainnya untuk berpartisipasi dalam pengambilan keputusan partai. Ini diharapkan agar tidak

terjadi faksionalisasi dalam partai, baik bersifat vertical maupun horizontal.

Faksionalisasi yang terjadi dalam partai, juga dikarenakan dominannya politik kekerabatan yang membuat partai menjadi eksklusif dan tidak peka terhadap kehendak massa atau kader. Namun demikian tidak semuanya diletakkan kesalahan itu pada partai politik. Adanya sifat apatis dari masyarakat akan partai politik, juga ikut menyumbang pelanggaran politik kekerabatan dalam partai politik. Regulasi Negara juga bisa jadi menjadi pemicu tidak maksimalnya partai politik dalam menjalankan fungsinya.

Daftar Pustaka

- Bakti, Andi Faisal. 2007. *Kekuasaan Keluarga di Wajo Sulawesi Selatan*. Dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Buehler, Michael. 2009. *The Rising Importance of Personal Networks in Indonesia Local Politics?: An Analysis of District Government Head Elections in South Sulawesi in 2005*. Dalam Maribeth Erb dan Priyambudi Sulistiyanto (ed). *Deepening Democracy In Indonesia: Direct Elections for local Leaders (Pilkada)*. Singapore: ISEAS.
- Harjanto, Nico. 2011. *Politik Kekerabatan dan Institusionalisasi Partai Politik di Indonesia*. Dalam jurnal ANALISIS CSIS, Vol. 40, No.2, 2011.
- Haryanto. 2013. *Kahar Muzakkar dan Politik Klan di Sulawesi Selatan*. Paper: Mata Kuliah Kekuasaan, Konflik & Demokrasi, Ilmu Politik Pemerintahan UGM.
- Hidayat, Syarif. 2007. *Shedow State? Bisnis dan Politik di Provinsi Banten*. Dalam Henk Schulte Nordholt dan Gerry van Klinken (ed). *Politik Lokal di Indonesia*. Jakarta: KITLV dan Yayasan Obor Indonesia.
- Huntington, Samuel P. 2003. *Tertib Politik: Di Tengah pergeseran Kepentingan Massa*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Imawan, Riswandha. 2011. *Quo Vadis Demokrasi Indonesia*. Yogyakarta: PolGov JPP UGM.
- Imawan, Riswandha dan Mada Sukmajati. 2003. *Sentralisasi dan Otonomi Politisi dalam Pelaksanaan Desentralisasi dan Otonomi Kota Madiun*. Dalam Jim Schiller (ed). *Jalan Terjal Reformasi Lokal: Dinamika Politik di Indonesia*. Yogyakarta: Program Pascasarjana PLOD UGM.
- Lipset, Seymour Martin. 2007. *Political Man: Basis Sosial Tentang Politik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mujani, Saiful, R. William Liddle & Kuskridho Ambardi. 2012. *Kuasa Rakyat: Analisis Tentang Perilaku Pemilih dalam pemilihan legislatif dan Presiden Indonesia Pasca-Orde Baru*. Jakarta: Mizan.

- Mulgan, Geoff. 1995. *Politik Dalam Sebuah Era Anti-Politik*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Pamungkas, Sigit. 2011. *Partai Politik: Teori dan Praktek di Indonesia*. Yogyakarta: Institute for Democracy and Welfarism.
- Pratikno. 2007. Calon Independen, Kualitas Pilkada dan Pelembagaan Parpol. Dalam *Jurnal Ilmu Sosial dan Ilmu Politik* Volume 10, Nomor 3, Maret 2007.
- Randall, Vicky dan Lars Svåsand. 2002. *Party Institutionalization In New Democracies*. Dalam *jurnal Party Politics* Vol 8. No.1, SAGE Publications.
- Robert Michels. 1984. *Partai Politik: Kecenderungan Oligarkis dalam Birokrasi*. Jakarta: Rajawali.
- Sidel, John T. 2005. *Bosisme dan Demokrasi di Filipina, Thailand dan Indonesia*. Dalam John Harriss, Kristian Stokke dan Olle Tornquist. *Politisasi Demokrasi: Politik Lokal Baru*. Jakarta: Demos.

Koran dan Internet

- Kompas, "Atur Mekanisme Perekrutan Calon", tanggal 7 Maret 2013.
- KPU Kep. Selayar
- Contrend Media Selayar, "Daftar Anggota DPRD Kab. Kepulauan Selayar 2009-2014", diakses pada tanggal 5 Juni 2013.
- Contrend Media Selayar, "37,5 Persen Konsitituen PDIP Dukung Syiar (16/5/10)" diakses pada tanggal 5 Juni 2013.